

**PROBLEMATIKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) DI KAWASAN *BANTO TRADE CENTRE* (BTC)
BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**Oleh:
MURNI LESTARI
05 / 65244**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

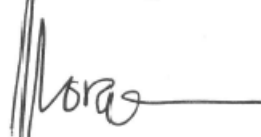
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan
Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi
Nama : Murni Lestari
NIM : 65244
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2011

Disetujui oleh

Pembimbing I



Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197308091998022001

Pembimbing II



Erianjoni, S.Sos, M.Si
NIP.197402282001121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Sosiologi



Drs. Emizal Amri, M.Si, M.Pd
NIP. 195905111985031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 18 Juli 2011**

Judul : Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan *Banto Trade Centre* (BTC) Bukittinggi
Nama : Murni Lestari
NIM : 65244
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2011

Tim Penguji	Nama
1. Ketua	: Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
2. Sekretaris	: Erianjoni, S.Sos, M.Si
3. Anggota	: Drs. Ikhwan, M.Si
4. Anggota	: Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
5. Anggota	: Wirdaningsih, S.Sos, M.Si

Tanda Tangan



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murni Lestari
NIM/BP : 65244/2005
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul **“Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi”** adalah benar merupakan hasil karya sendiri bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia di proses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2011

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi



Drs. Emizal Amri, M.Si, M.Pd
NIP. 195905111985031003

Saya yang menyatakan,



Murni Lestari
65244/2005



*“Bukankah telah kami lapangkan dadamu
dan kami hilangkan beban yang memberati punggungmu
dan kami tinggikan namamu”*

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kami telah selesai dengan satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada Allah (sajalah) kami berharap. (QS Alam Nasyrat, 1-8)

Puji dan Syukur pada Allah...

untuk semua Rahmat, Anugerah dan Ujian disetiap langkah kehidupan ku, pilihan dan kesempatan yang membuat aku semakin mengerti akan makna diri dan kehidupan ini.

Aku yakin Ya Allah...

Engkau akan selalu menguatkan hatiku,

Engkau akan selalu membimbing jiwaku,

Engkau akan selalu menerangi jalanku,

Dan Engkau akan selalu menuntun langkahku.

Ya Allah...

Jadikanlah tetesan keringatku

Sebagai mutiara yang berkilau dikala gelap

Jadikanlah kesalahanku

Sebagai kendaraan dari kata kepayahanku, dan

Jadikanlah butiran air mataku

Sebagai penyejuk di kala kehausan.

Amin Ya Allah..

Telah ku raih satu cita dari segenggam mimpi dan harapan di antara apa yang melintang dalam gelombang kehidupan dari perjalanan yang aku jalani, walaupun cobaan dan rintangan selalu berganti dan derai air mata yang mengiringi setiap doaku... Namun ku selalu berusaha untuk tegas karena aku menyadari bahwa langkahku hari ini akan menuntun arah perjalanan kehidupanku di hari esok.

Kupersembahkan karya ku ini teristimewa untuk...

Ke-2 orang tua ku yang sangat aku sayangi, Mama (Marsiyanti) & Papa (Tarso) sosok yang menjadi panutan & paling aku banggakan. Mam & Pap trimakasih atas segala do'a, pengorbanan, kesabaran (dalam menunggu aku sampai wisuda), didikan, kasih sayang serta tetesan keringat Mam & Pap untuk aku... Semoga aku bisa selalu membanggakan & membahagiakan Mam & Pap karena kalian adalah hal terindah & terhebat dalam perjalanan hidupku & selalu hadir dalam hati & do'a ku...

Untuk adik2 ku Dwi Utami (mim, rajin2 kuliah biar dapat beasiswa trus & bisa buat Mam & Pap bangga ma kita), Try Mawas Koro (bojezz jangan malas belajar, rajin2 sekolah biar nilainya bagus)... Semoga kita ber-3 selalu menyayangi & menjadi anak2 yang bisa dibanggakan Mam & Pap yang selalu memberikan perjuangan & pengorbanan yang paling terbaik untuk kita... untuk mbah ku (Marsiyah) trimakasih untuk semuanya.

Terima kasih untuk Ibu Nora Susilawati, S.sos, M.Si & Bapak Erianjoni, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, selalu sabar dalam mengarahkan & memberikan bimbingan yang sangat berharga sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan anugerah atas kebaikan Ibu & Bapak selama ini.

Amiin Ya Allah...

Terima kasih untuk tim penguji ku Bapak Drs. Ikhwani, M.Si, Ibu Mira Hasti Hasmira, S.H, M.Si dan Ibu Wirdanengsih, S.Sos, M.Si atas masukan kritik & saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih kepada ketua jurusan Sosiologi Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si beserta staf dosen jurusan Sosiologi (pak eka, pak jun, pak anto) atas kemanfaatan ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak & Ibu selalu diselimuti kesehatan, kebahagiaan serta karunia dari Allah.

Amiin Ya Allah...

Terima kasih untuk sahabat terbaikku Rozi Febriani (makasih y jay selalu menyemangati ku biar bisa menyelesaikan skripsi ini & akhirnya terselesaikan juga, baralek kita lagi..!!!!), Rici Purwasih (coo, makasih untuk persahabatan kita selama ini, denger curhat tor). Kalian semua adalah sahabat sejati ku yang selalu ada selamanya.

Buat semua temen2 o5 makasih untuk persahabtan selama ini, Mengenal kalian adalah suatu keberuntungan & kebahagiaan ku. Semoga kenangan kita tak akan hilang sampai kapanpun. Buat temen2 o4 (kak rina, kak zil, kak yesi, kak ica), temen2 o6 (Sandra, tu kan bareng juga kita wisuda, lah sanang kan), temen2 o7, o8, o9, 10.....

Buat temen2 di Pondokan Putri: Noris (semangat buat skripsinya ya), anak2 kamar 1 (Wita, Ika & Lini), buat Neng & Dini (tetep semangat..!!). makasih untuk semua warga Pondokan Putri.

Teristimewa untuk seseorang yang ada dalam Hati & Jiwaku (Zulfa Effendi), makasih untuk cinta & kasih sayang, pengorbanan & kesabaran dalam menghadapi & menemaniku dalam suka & duka, semua itu adalah sandaran ku dalam menghadapi semua ini makasih ya pi.. semoga kita ber-2 berada dalam Rahmat & Keridhaan-Nya.

Amiin Ya Allah...

Akhir kata ku ucapkan terima kasih kepada semua yang mengenalku, mohon maaf jika tidak bisa dituliskan satu persatu semoga kita semua selalu dilindungi Allah serta memperoleh Rahmat & Karunia-Nya di dunai & akhirat.

Thanks For You All

Murni Lestari

ABSTRAK

Murni Lestari. 2011. Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi. Skripsi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. Pembimbing: 1) Nora Susilawati, S.Sos, M. Si, 2) Erianjoni, S.Sos, M. Si.

Pembangunan BTC yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan suatu usaha untuk merubah bentuk pasar tradisional menjadi pasar modern. Operasional BTC pada kenyataannya belum berjalan optimal mengakibatkan munculnya problematika lain yaitu maraknya PKL yang berdagang di kawasan BTC Bukittinggi yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban kota. Pemko Bukittinggi beserta jajarannya yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi sudah menempuh berbagai upaya untuk melakukan penertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan penelitian adalah Bagaimanakah Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) dan Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi, dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan problematika penertiban PKL di kawasan BTC Kota Bukittinggi dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penertiban PKL di kawasan BTC Kota Bukittinggi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif sistem pengendalian sosial oleh Peter L. Berger, dimana adanya suatu alat pengendalian sosial yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi dalam melaksanakan penertiban terhadap PKL di kawasan BTC Bukittinggi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan dan di Jalan Soekarno-Hatta Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus *instrinsik*. Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *purposive sampling* dengan jumlah informan 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Analisis data yang digunakan adalah Model Miles dan Huberman (Model Analisa Interaktif) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adanya problematika penertiban PKL di kawasan BTC yaitu: kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap PKL, keterbatasan jumlah personil aparat, keterbatasan lahan lokasi pasar, rendahnya kesadaran hukum para PKL dan adanya pandangan pro dan kontra tentang keberadaan PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi sejauh ini masih dalam pelaksanaan razia dan pemberian sosialisasi terhadap PKL di kawasan BTC Bukittinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis aturkan kehadiran **ALLAH SWT** karena limpahan rahmat dan hidayahNya, serta salawat beriring salam kepada **Nabi Muhammad SAW** yang menjadi tauladan bagi umat manusia, sehingga dengan usaha sepenuh hati dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi**”.

Skripsi ini merupakan salah satu implementasi ilmu pengetahuan yang di dapat sewaktu penulis mengikuti perkuliahan dan juga berguna untuk melengkapi sebagai persyaratan gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih setulusnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Nora Susilawati, S.Sos. M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Erianjoni, S.Sos. M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi dan pemahaman kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini sehingga selesai sampai sekarang.
3. Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi.

4. Bapak Adri Febrianto, S.Sos. M.Si selaku penasehat akademik dan staf pengajar Jurusan Sosiologi FIS UNP.
5. Para informan dari Satpol PP (Bapak Rekha Syahrul), Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi dan para PKL yang telah memberi informasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan data yang akurat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk keluarga tercinta mama dan papa yang telah memberi dukungan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini serta untuk adik-adikku tersayang serta untuk seseorang yang selama ini menemaniku dalam suka dan duka, memberi semangat yang luar biasa.
7. Buat teman-teman Sosant R dan NR 05, terima kasih untuk persahabatannya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Akhir kata penulis berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. **Amin.**

Padang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Teknik Pengumpulan Data.....	19
BAB II. KOTA BUKITTINGGI DAN KAWASAN <i>BANTO TRADE</i>	
<i>CENTRE (BTC) BUKITTINGGI</i>	
A. Kondisi Geografis	26
B. Kondisi Demografis	29
1. Penduduk.....	29
2. Pendidikan.....	31
3. Mata Pencarian.....	33
4. Agama.....	33
5. Kehidupan Sosial Budaya.....	34
C. Keadaan Pasar Kota Bukittinggi.....	35
D. Keadaan Pasar Banto Bukittinggi	37
E. Sejarah Singkat Pembangunan BTC Bukittinggi.....	39
F. PKL di Kawasan BTC Bukittinggi.....	41

BAB III. PEMBAHASAN

A. Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan

Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi..... 48

1. Kebijakan Pemko Bukittinggi terhadap PKL..... 55

2. Keterbatasan Jumlah Personil Aparat..... 57

3. Keterbatasan Lahan Lokasi Pasar..... 59

4. Rendahnya Kesadaran Hukum Bagi Para PKL..... 63

5. Pandangan Pro dan Kontra Tentang Keberadaan PKL..... 69

B. Upaya Penertiban PKL di Kawasan BTC Bukittinggi..... 71

1. Pelaksanaan Razia..... 73

2. Sosialisasi Terhadap PKL..... 80

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan Geografis Kota Bukittinggi	27
2. Luas Daerah Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan.....	28
3. Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi.....	30
4. Indikator Kependudukan.....	30
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
6. Indikator Pendidikan.....	32
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	34
8. Luas Toko dan Los Pasar Bukittinggi beserta jumlah.....	36
9. Data Jumlah PKL yang di Tertibkan oleh Satpol PP.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Informan
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
4. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari Kantor Kesbangpol Bukittinggi
5. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi
6. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi
7. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi
8. Gambar PKL di kawasan BTC Bukittinggi
9. Gambar Pelaksanaan Razia Oleh Satpol PP di kawasan BTC Bukittinggi
10. Gambar Kemacetan di kawasan BTC Bukittinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan menuju kemajuan dan perbaikan sesuatu yang ingin dicapai, dimana kegiatan untuk kemajuan dan perbaikan itu sendiri dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya (<http://id.wikipedia.org/wiki/pembangunan>). Pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Indonesia pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara mengadakan perubahan dalam bidang sosial budaya maupun ekonomi. Pembangunan itu dilaksanakan merata di seluruh tanah air, bukan untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, melainkan untuk seluruh masyarakat. Pembangunan itu harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Sehubungan dengan itu pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap serta berlanjut dalam rangka perwujudan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju

(http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=212).

Pada prinsipnya pembangunan dilaksanakan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup masyarakat dengan cara

mengadakan perubahan diberbagai bidang seperti: ekonomi, sosial dan budaya artinya bahwa pembangunan dapat mempercepat perubahan. Dimana dalam pelaksanaan pembangunan tersebut mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral serta etikanya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat juga sedang bergiat melaksanakan pembangunan. Salah satu daerah di provinsi ini yang juga sedang melaksanakan pembangunan adalah Kota Bukittinggi. Bukittinggi sebagai kota sedang berkembang terus berusaha membenahi diri agar lebih baik dan selalu siap menghadapi berbagai kebutuhan warganya pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sebagai kota wisata, Bukittinggi selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun dari luar. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2009 pengunjung Bukittinggi berjumlah lebih kurang 6000 orang sedangkan pada tahun 2010 meningkat sekitar 10.000 orang pengunjung (http://www.Bukittinggikota.go.id/v2/indek.php?file_id=1&class=news&act=read&news_id=627). Peningkatan pengunjung Bukittinggi didominasi karena Kota Bukittinggi banyak memiliki tempat wisata seperti: Jam Gadang, Kebun Binatang Kinantan, Benteng For deKock dan Ngarai Sianok. Ramainya pengunjung Bukittinggi berdampak positif terhadap perdagangan di kota ini. Jadi tidak heran bila Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembangunan dibidang perdagangan dengan dibangunnya *Banto Trade Centre* (BTC).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yakni perubahan dari segala bidang yang dilakukan secara sejajar berdasarkan suatu rencana tertentu atau dengan kata lain pembangunan itu sebagai suatu perubahan kearah pembentukan masyarakat yang baru yang mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional ke modern. Sejalan dengan tujuan pembangunan di atas dapat dilihat pembangunan BTC yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan usaha untuk merubah bentuk pasar tradisional menjadi pasar modern.

Sebelum dibangunnya BTC, dahulu kawasan BTC merupakan areal Pasar Banto yang berdiri lebih kurang 25 tahun yang lalu adalah suatu pasar yang bangunannya sangat megah akan tetapi ditempati oleh pedagang yang managementnya sangat lemah dan tradisional sehingga keberadaan Pasar Banto tidak dapat mendorong pertumbuhan pasar dalam mendukung fungsi kota Bukittinggi (Arsip Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi).

Melihat situasi inilah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi ingin mewujudkan Pasar Banto menjadi pertokoan yang *reseprentatif* karena terletak di lokasi strategis sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Pemerintah menilai Pasar Banto tidak *reseprentatif* dan merupakan pasar yang sangat kotor. Hal ini dikarenakan pasar tersebut digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang merusak fungsi pasar itu sendiri seperti: buang air, tempat mabuk-mabukan dan juga digunakan sebagai tempat maksiat (Arsip Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi).

Proses perencanaan pembangunan pusat pertokoan di BTC dimaksudkan agar merubah pertokoan yang tidak *resepresentatif* menjadi *resepresentatif* dan dapat berfungsi secara maksimal serta mengatasi permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi di kawasan Pasar Banto. Namun dalam hal ini Bukittinggi tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pusat pertokoan BTC ini. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mencari dana untuk membangun BTC melalui investor. Pembangunan BTC dilakukan oleh PT Citicon pada tahun 2006 melalui Surat Keterangan Wali Kota Bukittinggi No.188.45-06-2006 tentang kerjasama penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pusat pertokoan dan gedung parkir BTC Kota Bukittinggi dengan PT Citicon-Jakarta.

Bukittinggi sebagai kota yang terus berbenah diri dengan menjalankan berbagai program pembangunan seperti BTC tidak luput dari berbagai masalah yaitu berupa masalah ketertiban dan keamanan masyarakat, oleh sebab itu perhatian pemerintah kota untuk mengatasi berbagai persoalan yang bakal timbul di tengah-tengah masyarakat memerlukan langkah yang tepat untuk menetapkan berbagai kebijakan dan dapat menghambat lajunya berbagai perbuatan serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kota.

BTC pada dasarnya diperuntukkan bagi para pedagang agar bisa berdagang di tempat yang lebih baik yang telah disediakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Operasional BTC pada kenyataannya tidak atau belum berjalan

sebagaimana mestinya (belum optimal). Pembangunan BTC justru mengakibatkan munculnya problematika yang lebih kompleks. Salah satu problematika yang muncul adalah maraknya PKL yang berjualan di kawasan BTC khususnya di areal trotoar dan badan jalan di kawasan BTC. PKL tumbuh akibat tingginya angka kemiskinan di kota-kota besar. Pekerjaan sebagai PKL bisa dilakoni dengan modal lebih kecil. Terdapat beberapa ciri dari sektor informal yang dikemukakan oleh Damsar yaitu: 1). Mudah dimasuki dalam arti kata modal dan organisasi 2). Beroperasi pada skala kecil 3). Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana 4). Pasar tidak diatur dan komperatif 5). Tingkat produktivitas rendah (Damsar, 1997:159).

Suatu dilema yang dihadapi Pemerintah Kota sekarang terhadap PKL terhadap lapangan pekerjaan baru namun disisi lain dihadapkan pada permasalahan klasik yakni ketidakteraturan dan ketertiban kota, seperti yang dikemukakan Chris Manning dan Tadjudin Noer Effendi “para pejabat kota dan kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah sembarang tempat, gangguan pejalan kaki, saingan pada toko yang tertib dan membayar pajak serta penyebab penyakit lewat kontak pedagang dari penjualan makanan yang kotor dan basi (Manning dan Tadjudin, 1996:214).

PKL yang berada di kawasan BTC disebabkan oleh ketidakoptimalan pengoperasian BTC itu sendiri karena kios-kios yang disediakan BTC biaya

operasionalnya sangat tinggi sehingga para penjual mengalami kesulitan untuk mengontrak maupun membeli kios-kios yang telah disediakan, sehingga kondisi BTC sangat sepi dari pedagang maupun pembeli, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para PKL untuk dapat berdagang di kawasan BTC tersebut.

Kebanyakan para PKL yang berada di kawasan BTC adalah para pedagang pendatang yang datang dari luar Kota Bukittinggi seperti daerah Agam (Gaduik, Kamang, Kapau, Baso dan Padang Luar) maupun dari Kota Payakumbuh. Biasanya barang dagangan mereka berupa sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun lauk pauk. Barang dagangan mereka biasanya didapat dari hasil panen mereka dari tempat asal mereka masing-masing. Para pedagang biasanya sudah mulai berdatangan pada pukul 05.30 WIB pada setiap harinya. Problematika yang muncul dari PKL ini adalah mereka berdagang di kawasan BTC antara lain: di trotoar-trotoar sepanjang BTC, areal parkir BTC dan sampai menggunakan badan jalan raya, padahal kawasan di sekitar BTC harus selalu bersih dari PKL karena kawasan BTC adalah kawasan jalan utama arus transportasi Kota Bukittinggi.

Penertiban PKL sudah sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk menekan angka PKL yang ada di kawasan BTC, mengawasi para PKL agar tidak melimpah ruah di kawasan BTC yang dapat mengganggu kepentingan umum dan keamanan disekitarnya. Upaya penertiban PKL ini dimaksudkan juga untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi No.25/2004 dengan tegas menyatakan larangan

untuk berjualan di jalan-jalan, trotoar, tempat umum, taman, jenjang umum dan lainnya. Selain itu dimaksudkan juga untuk mempertahankan gelar penghargaan Adipura Kencana yang telah diterima kota Bukittinggi dimana kota Bukittinggi berhasil melaksanakan K-3 (kebersihan, ketentraman dan keindahan).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan tenaga operasional utamanya yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi. Satpol PP dalam hal ini menjalankan tugasnya dalam rangka penertiban PKL di kawasan BTC untuk menjalankan Perda Kota Bukittinggi No.25/2004. Semenjak diresmikannya BTC pada tahun 2006 sebagai pasar modern, tetapi dua tahun belakangan inilah Pemerintah Kota Bukittinggi merasa disibukkan dengan keberadaan PKL yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban kota, selain itu keberadaan PKL sudah tidak dapat dikendalikan lagi.

Dalam upaya penertiban PKL ini Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan upaya penertiban ini. Salah satu peran Satpol PP dalam PP No.6 tahun 2010 adalah menindak masyarakat, badan hukum, aparat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, apalagi dalam dua tahun ini upaya penertiban PKL semakin gencar dilakukan oleh para aparat Satpol PP terhadap PKL yang berada di kawasan BTC. Upaya para aparat Satpol PP dalam penertiban PKL adalah dengan melaksanakan razia pada hari-hari tertentu dan mengadakan razia gabungan dengan DLLAJ pada hari Rabu dan Sabtu. Berdasarkan data yang

didapat dari Kantor Dinas Satpol PP bahwasanya sudah banyak para PKL yang dibawa ke Kantor Dinas Satpol PP untuk diberikan sosialisasi tentang larangan berjualan di kawasan BTC. Walaupun terkadang aparat Satpol PP melakukan tindakan keras dengan cara menegur dengan perkataan tegas atau dengan cara mengangkut barang dagangan mereka dan membawanya ke Kantor Dinas Satpol PP (Data Kantor Dinas Satpol PP Bukittinggi).

Segala bentuk razia terhadap PKL di kawasan BTC telah sering dilakukan oleh aparat Satpol PP. Namun keberadaan PKL di BTC tidak dapat dilumpuhkan oleh aparat Satpol PP padahal sekitar pukul 07.30 WIB aparat Satpol PP telah berada di kawasan BTC, tetapi para PKL tidak merasa takut terhadap tindakan aparat Satpol PP. Para PKL hanya patuh sesaat dengan razia untuk meninggalkan kawasan BTC, namun hanya beberapa menit kemudian mereka kembali menempati kawasan BTC untuk berjualan kembali, padahal para PKL mengetahui bahwa para aparat Satpol PP masih berada di kawasan BTC (Harian Haluan, 12 November 2010 hal 17). Operasi penertiban PKL yang dilakukan aparat Satpol PP terhadap PKL tidak mengurangi jumlah PKL di kawasan BTC, bahkan sebagian besar PKL di kawasan BTC tidak pernah jera dari razia yang dilakukan.

Menurut Bapak Syafar selaku Kasi Perencanaan menjelaskan bahwa Bukittinggi itu tidak seperti karet tidak bisa ditarik ulur, Bukittinggi berada pada 25 km². Pertumbuhan PKL tiap tahunnya meningkat sekitar 16%-20% sehingga keberadaan PKL semakin menjamur di tengah Kota Bukittinggi. Kendala yang dihadapi Satpol PP Bukittinggi adalah keberadaan PKL di

BTC yang sulit dilumpuhkan. Hal ini disebabkan karena PKL beranggapan bahwa potensi berdagang di kawasan BTC sangat menguntungkan dari pada di kawasan lain sehingga para PKL melimpah ruah di kawasan BTC. PKL itu sendiri tidak mau tahu dengan resiko terhadap orang lain yang menggunakan fasilitas umum dan PKL tidak peduli dengan aparat. Selain itu, kendala ekonomi menjadi alasan mereka untuk berjualan di kawasan BTC karena mereka tidak mampu membeli petak ruko dan kios di pasar.

Satpol PP ini sendiri akan tetap komit dengan aturan yang ada tidak akan berhenti melaksanakan razia selagi Perda yang berkaitan masih digunakan dan DPRD Bukittinggi sendiri sudah cukup menjelaskan di Perda tersebut. Bapak Syafar juga menjelaskan bahwa dengan membiarkan PKL tetap menggunakan fasilitas umum maka berapa orang yang akan dirugikan, khususnya masyarakat umum.

Selain penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, penertiban juga dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi. Namun upaya penertiban yang dilakukan seperti memberi sosialisasi terhadap PKL belum memperlihatkan hasil untuk menekan jumlah para PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Penertiban yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi hampir sama dengan penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP.

Penelitian mengenai ketertiban dan keamanan kota telah dilakukan oleh Zul Marsal dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Satpol PP dan SK4 Dalam Penertiban PKL di Kota Padang” FIS UNP 2009. Penelitian ini mengangkat bagaimana koordinasi dan peranan Satpol PP dan SK4 sebagai

organisasi penegak Peraturan Daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan kota khususnya mengenai masalah PKL. Satpol PP dan SK4 Kota Padang satu organisasi kesatuan yang sama bertujuan untuk menciptakan ketertiban khususnya masalah PKL di kota yang masih berjualan di tempat fasilitas umum sehingga menimbulkan kesembrawutan dan kemacetan kota.

Pemerintah kota beserta aparat Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi sudah menempuh berbagai cara dalam problem penertiban PKL. Penertiban terhadap PKL dilakukan secara terus menerus oleh aparat Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi di kawasan BTC. Hal ini merupakan sebagai antisipasi untuk menghambat dampak yang lebih buruk dengan mengurangi dan bahkan memberantas PKL yang ada disekitar kawasan BTC.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Keberadaan PKL yang berada di kawasan BTC sering kali dianggap menjadi penyebab kesembrawutan dan ketertiban kota karena para PKL menggelar barang dagangan mereka di kawasan atau tempat sarana umum yang ada di kawasan BTC yang seharusnya tempat itu tidak diperbolehkan untuk berjualan. Adanya penertiban yang dilakukan oleh aparat terkait yaitu Satpol PP terhadap PKL berlandaskan Perda Kota Bukittinggi No.25/2004 untuk larangan berjualan di jalan-jalan, trotoar, tempat umum, taman, jenjang umum dan lainnya. Namun upaya petugas Satpol PP dan Dinas Pengelolaan

Pasar Bukittinggi tidak membuat para PKL jera untuk tetap berdagang di kawasan BTC.

Penertiban PKL sudah sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu dengan dinas terkait (Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar) dengan tujuan untuk menekan angka PKL yang ada di kawasan BTC, mengawasi para PKL agar tidak melimpah ruah di kawasan BTC yang dapat mengganggu kepentingan umum dan keamanan disekitarnya. Upaya para aparat Satpol PP dalam penertiban PKL adalah dengan melaksanakan razia pada hari-hari tertentu dan mengadakan razia gabungan dengan DLLAJ pada hari Rabu dan Sabtu. Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Dinas Satpol PP bahwasanya sudah banyak para PKL yang dibawa ke Kantor Dinas Satpol PP untuk diberikan sosialisasi tentang larangan berjualan di kawasan BTC. Walaupun terkadang aparat Satpol PP melakukan tindakan keras dengan cara menegur dengan perkataan tegas atau dengan cara mengangkut barang dagangan mereka dan membawanya ke Kantor Dinas Satpol PP. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : *“Bagaimanakah Problematika Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC)” dan Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Banto Trade Centre (BTC) Bukittinggi”*.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan problematika penertiban PKL di kawasan BTC Kota Bukittinggi dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penertiban PKL di kawasan BTC Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademik maupun praktis. Manfaat akademik adalah 1). Menghasilkan tulisan ilmiah tentang bagaimana problematika penertiban PKL di kawasan BTC Kota Bukittinggi 2). Dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan melakukan penelitian senada dengan penelitian ini. Manfaat praktis adalah dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kota dalam upaya menyusun, menyempurnakan serta menetapkan pelaksanaan program pembangunan khususnya mengenai pasar di Bukittinggi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Untuk memahami permasalahan penelitian problematika penertiban PKL di Bukittinggi khususnya yang ada di kawasan BTC penulis mencoba menggunakan Teori pengendalian sosial. Menurut Peter L. Berger pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membakang. Lain halnya dengan Roucek, pengendalian sosial suatu istilah yang mengacu pada proses terencana maupun tidak terencana melalui individu diajak, dibujuk,

dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok atau dengan istilah proses sosialisasi (Kamanto, 2004:57). Kemudian menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.

Setiap organisasi menggunakan sarana pengendalian sosial untuk melaksanakan norma-norma yang menentukan standar pelaksanaan kerja. Sarana pengendalian sosial yang ditetapkan organisasi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu 1). Sistem pengendalian sosial yang didasarkan atas sarana fisik yang disebut dengan kekuatan memaksa (*coercive power*) seperti penggunaan senjata, cambuk dan borgol. 2). Ganjaran material dapat berbentuk barang dan jasa misalnya uang yang menyebabkan seseorang mendapatkan hal tersebut. 3). Simbol yang tidak menimbulkan ancaman fisik atau tuntunan atas dasar ganjaran materi simbol normatif yaitu *prestisedan* penghargaan, maupun simbol sosial yaitu cinta kasih, perbedaan jenis sarana penghargaan yang diterapkan oleh setiap organisasi, maupun perbedaan tekanan atas komitmen yang dipancarkan oleh sarana tersebut dalam banyak hal menunjukkan perbedaan masing-masing struktur organisasi (Etzioni, 1985:84-102). Dalam hal ini organisasi formalnya adalah Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi yang melakukan penertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi.

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh pribadi terhadap pribadi lainnya, pribadi terhadap kelompok tertentu, kelompok terhadap kelompok lainnya dan kelompok terhadap pribadi. Dalam hal ini yakni kelompok aparat keamanan seperti Satpol PP dan dinas terkait yaitu Dinas Pengelolaan Pasar terhadap penertiban PKL. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan masyarakat atau secara ideal bertujuan untuk mencapai kedamaian (Soekanto, 2001:226).

Dalam hal ini, PKL merupakan sebuah kelompok sosial yang keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Dimana para pedagang mengabaikan himbauan pemerintah kota (Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar) agar tidak berjualan di kawasan yang mengganggu fasilitas umum khususnya di kawasan BTC, pada hal larangan tersebut sudah diatur dalam Perda Kota Bukittinggi No.25/2004. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman para pedagang tentang akan timbulnya suatu resiko terhadap orang lain atau masyarakat umum dan tidak menghiraukan keberadaan aparat Satpol PP.

Dalam hal ini PKL yang berada di kawasan BTC pada dasarnya sudah melanggar peraturan dari pemerintah kota, mereka berjualan di kawasan BTC semata-mata karena kawasan tersebut strategis untuk berjualan karena dekat dari pusat keramaian dan jalur transportasi Kota Bukittinggi. Sehingga problematika tersebut harus dikontrol oleh para petugas terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi.

Pada dasarnya pengendalian sosial terbagi atas dua sifat yaitu:

- a. *Preventif*, pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dalam bentuk sanksi.
- b. *Represif*, pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan arti mengendalikan untuk memulihkan keadaan seperti semula.

Pengendalian sosial dalam arti mengendalikan tingkah seperti tingkah pekerti masyarakat agar selalu konform dengan keharusan norma hampir selalu dijalankan dengan bersyaratkan sanksi. Sanksi adalah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan pada masyarakat yang terbukti melanggar norma sosial.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan pengendalian sosial yaitu; 1) sanksi bersifat fisik, sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut, 2) sanksi psikologik, penderitaan yang dikenakan pada pelanggar bersifat kejiwaan dan mengenai perasaan, 3) sanksi ekonomik, beban penderitaan yang dikenakan pada pelanggar berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonominya (Narwoko, 2004:135)

Dalam hal ini, penertiban PKL yang ada di kawasan BTC dapat dikatakan bersifat *represif* dimana adanya pengendalian sosial dari Pemerintah Kota dilakukan setelah para pedagang menggunakan area fasilitas umum di kawasan BTC secara bebas. Sehingga sering dilakukannya razia dengan cara menegur dengan perkataan tegas atau

mengangkut barang dagangan mereka ke kantor Dinas Satpol PP. Hal ini merupakan sebuah sanksi yang dijalankan oleh pemerintah kota dengan aparat terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi.

Cara pengendalian sosial dalam masyarakat dapat dijalankan dengan dua cara yaitu: 1) cara persuasif, terjadi apabila pengendalian sosial ditekan pada usaha untuk mengajak, membimbing; 2) cara koersif, tekanan diletakkan pada kekerasan dan ancaman dengan mempergunakan kekuatan fisik atau kekerasan. Berger mengemukakan bahwa orang hidup dalam situasi dimana kekerasan fisik dapat digunakan secara tidak resmi, cara lain yang digunakan masyarakat untuk mengendalikan anggotanya yaitu membujuk, memperolok-olokan, mendesas-desuskan, mempermalukan dan mengucilkan (Kamanto, 2004:57). Dalam hal ini, cara pengendalian sosial yang digunakan adalah dengan cara *persuasif* yaitu berupa membujuk, mengajak dan membimbing. Para PKL yang terjerat razia Satpol PP maka barang dagangan mereka akan dibawa ke Kanto Satpol PP dan pada saat PKL datang menjemput maka ada saat itu aparat akan memberi pengarahan dan sosialisasi terhadap PKL agar tidak berdagang di kawasan BTC.

2. Batasan Konsep

a. Problematika

Berasal dari kata problem yang memiliki artinya masalah. Masalah menurut Moh. Nazir (1983:34) muncul karena adanya tantangan kesangsian atau kebingungan kata terhadap suatu hal atau fenomena, adanya

kemenduaan arti, adanya hal atau tantangan, adanya celah baik antara kenyataan atau antara fenomena baik yang telah ada ataupun yang akan ada. Problematika dalam penelitian ini adalah rangkaian permasalahan dalam suatu fenomena sosial dimana dapat mengganggu masyarakat atau keadaan sekitarnya.

b. Penertiban

Istilah penertiban secara luas digunakan dalam ilmu sosial. Dalam sosiologi dan antropologi istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Penertiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk menciptakan keadaan selaras dan serasi dalam kehidupan masyarakat.

c. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima adalah orang atau perorangan dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Berdagang skala kaki lima dilakukan dimana saja terutama ditempat keramaian.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan dan di Jalan Soekarno Hatta, lokasi ini dipilih karena BTC tepat berada pada dua jalur

jalan tersebut. Di kawasan BTC inilah yang paling banyak (lebih kurang 200 PKL) dipergunakan PKL untuk berjualan dimana dapat mengganggu ketertiban dan keamanan Kota Bukittinggi.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang terlibat dalam problematika penertiban PKL di kawasan BTC. Pendekatan ini dipilih karena dapat membuka peluang untuk mengungkapkan detail informasi lebih tajam dan mendalam mengenai suatu peristiwa kontemporer (peristiwa masa kini) yaitu mengenai problematika penertiban PKL di kawasan BTC.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus *instrinsik* yaitu studi kasus tunggal yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut tentang suatu kasus khusus (problematika penertiban PKL). Alasan khusus pemilihan tipe penelitian ini bukan karena ini mewakili kasus-kasus lainnya, melainkan karena kekhususannya sehingga kasus itu memang menarik (Sitorus, 1998:25). Mengingat studi kasus ini merupakan *single case studies* (studi kasus tunggal) maka dalam penelitian ini tidak memiliki perbandingan antara kasus lainnya melainkan hanya melakukan sebuah studi kasus yaitu problematika penertiban PKL di kawasan BTC di Bukittinggi.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data tentang gejala-gejala yang terjadi secara umum. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan maksud peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria (tujuan penelitian). Adapun kriteria informan adalah: PKL yang berjualan di kawasan BTC lebih dari 1 tahun, aparat Satpol PP Bukittinggi, Kepala beserta staf Dinas Pasar Bukittinggi, Kepala atau staf Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi dan masyarakat umum.

Untuk mendapatkan data penelitian maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: PKL di kawasan BTC 7 orang, aparat Satpol PP 5 orang, Kepala atau staf Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi 3 orang, Kepala atau staf Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi 2 orang dan masyarakat umum 5 orang. Jadi jumlah informan dalam penelitian ini adalah 22 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung tentang kondisi objek yang diteliti. Observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh (Sugiyono, 2005:151-152).

Peneliti melihat bagaimana situasi dan kondisi, perilaku dan tingkah laku aparat dalam penertiban PKL di kawasan BTC. Observasi dilakukan untuk mengamati problematika penertiban PKL di kawasan BTC.

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi terbatas, dimana peneliti tidak merahasiakan identitas peneliti dimana peneliti melakukan observasi ini yang diketahui oleh subjek penelitian. Observasi partisipasi terbatas ini dilakukan dalam mengamati penertiban PKL di kawasan BTC yang dilakukan aparat terkait. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat memberikan gambaran yang konkrit mengenai permasalahan dalam penelitian peneliti.

Dalam observasi partisipasi terbatas, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat terhadap penertiban yang dilakukan oleh dinas terkait. Observasi pertama kali penulis lakukan pada pertengahan Maret 2011 dengan memperhatikan aktivitas para PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Peneliti mendapatkan informasi dari Kantor Dinas Satpol PP Bukittinggi tentang penertiban yang akan dilakukan terhadap PKL, sehingga saat penertiban peneliti dapat melihat langsung bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan. Hadirnya peneliti pada beberapa kali penertiban yang dilakukan Satpol PP pada 28 Maret 2011 pada pukul 07.30 WIB, 4 April 2011 pada pukul 07.30 WIB, 20 April 2011 pada pukul 16.30 WIB, 5 Mei 2011 pada pukul 16.00 WIB maka penulis dapat menyimpulkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dialami oleh para PKL.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Untuk mendapatkan data secara detail mengenai problematika penertiban PKL di kawasan BTC, wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Usman, 1995: 58).

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dikembangkan dari pedoman wawancara yang dibuat sebelum ke lapangan. Jawaban dari informan akan diikuti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pendalaman, sehingga diperoleh informasi sedetail mungkin dari para informan.

Penelitian di lapangan menggunakan alat atau *instrument* berupa pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelum wawancara di lokasi penelitian. Teknik wawancara ini menggunakan alat berupa catatan lapangan guna mempermudah penulis dalam penelitian. Hasil wawancara ada yang dicatat kemudian, dari catatan lapangan tersebut dibuat interaktif dan analisisnya. Wawancara umumnya dilakukan di kawasan BTC, di Kantor Dinas Satpol PP, di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Pekerjaan Umum.

Wawancara ini dilakukan dengan aparat Satpol PP, Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi dan Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi. Biasanya wawancara dilakukan pada jam kantor yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, sedangkan wawancara dengan PKL dilakukan pada waktu pagi hari di saat melakukan aktivitas berdagang. Peneliti melakukan pendekatan dengan cara membeli barang dagangan, peneliti mengajak bercerita pedagang pada saat peneliti memilih barang dagangan sehingga peneliti bisa berkomunikasi lebih lancar dan mendapatkan data yang lebih dalam dari PKL.

Adapun pencatatan data wawancara dilakukan dengan menggunakan beberapa alat wawancara yakni berupa catatan lapangan dan pedoman wawancara. Hasil wawancara dicatat kembali setelah wawancara selesai. Setelah proses pencatatan selesai barulah dilakukan interpretasi dan analisis data, data di lapangan tersebut disusun secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian yang akhirnya mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala, khususnya dalam pengumpulan data. Kendala yang dijumpai peneliti dalam proses pengambilan data adalah berkaitan dengan sikap para PKL dan staf anggota Satpol PP. PKL sendiri sangat sulit diminta untuk diwawancarai karena mereka beranggapan bahwa jawaban mereka nanti akan membahayakan diri mereka sendiri dan mereka juga beranggapan tidak ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian penulis. Namun,

kendala tersebut dapat diatasi dengan cara yang penulis lakukan yaitu dengan membeli barang dagangan mereka, penulis mengajak mereka bercerita pada saat penukis memilih barang dagangan yang akan dibeli. Kendala lain berasal dari anggota atau staf Satpol PP dimana mereka tidak bisa diwawancarai dengan berbagai alasan seperti ada urusan di lapangan atau kasus tersebut tidak mereka ketahui akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan bantuan Kepala Operasional Satpol PP dengan mendampingi penulis dalam melakukan wawancara dengan staf Satpol PP.

3. Validitas Data

Untuk menguji keabsahan data, penulis melakukan triangulasi data. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Data dianggap valid apabila data yang diperoleh relatif sama dari semua informan yang diwawancarai. Kemudian dianalisis sehingga dapat menjawab semua pertanyaan penelitian. Selain yang telah dijelaskan di atas, triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara sehingga didapatkan data yang valid dan akurat (Sugiyono, 2005:127). Sehingga data yang didapatkan di lapangan sudah teruji kebenarannya dan dapat dibuat sebuah laporan penelitian.

I. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian. Untuk kesinambungan dan kedalaman dalam memperoleh data, maka data dianalisis dengan menggunakan interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Milles dan Huberman dengan tiga langkah sebagai berikut (Milles dan Huberman, 1992: 16-20):

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian. Kemudian data yang terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah kembali. Selanjutnya dibuat ringkasan dan dipilih data sesuai dengan masalah yang diteliti yakni, problematika penertiban PKL di kawasan BTC, data yang tidak penting dibuang.

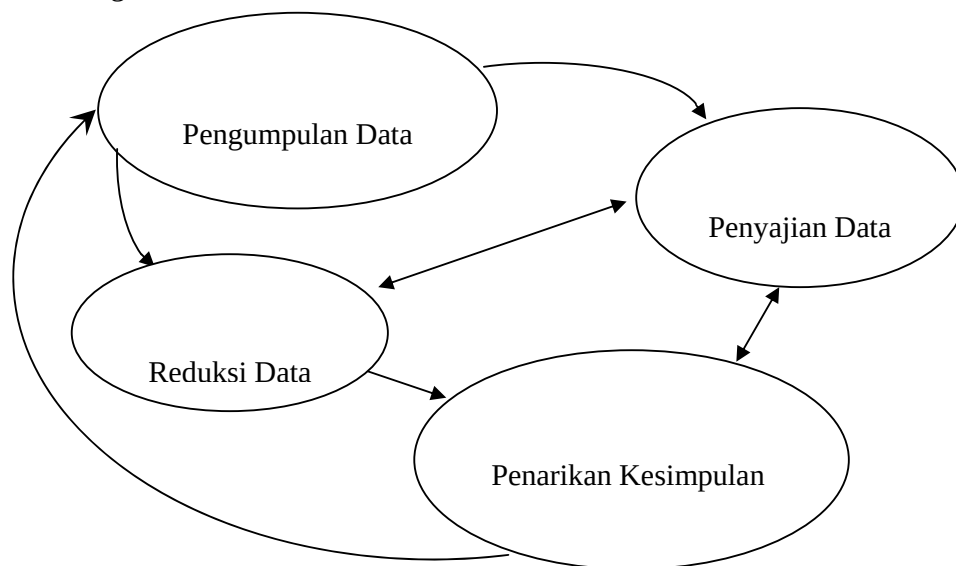
2. Penyajian Data

Setelah reduksi data maka peneliti melakukan pengelompokan data secara tersusun, agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Setelah dilakukan penyusunan dan pemberian kategori pada tiap-tiap pertanyaan reduksi data, maka penulis mengelompokkan data tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian yakni tentang problematika penertiban PKL di kawasan BTC.

3. Menarik Kesimpulan

Data yang diperoleh dicari maknanya, kemudian disimpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang mudah dimengerti. Penarikan kesimpulan diperoleh berdasarkan informasi yang didapat di lapangan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai problematika penertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Selanjutnya dilanjutkan dengan merumuskan temuan melalui penarikan kesimpulan dari analisis data.

Ketiga proses tersebut reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, mulai dilakukan sejak pengumpulan data. Langkah-langkah tersebut dapat membantu dalam penulisan skripsi. Komponen-komponen dan model analisis data yang ditulis oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Interaktif Miles dan Huberman

BAB II

KOTA BUKITTINGGI DAN KAWASAN BANTO TRADE CENTRE (BTC)

BUKITTINGGI

A. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak antara 100° 20'-100° 25 BT dan 00° 16'-00° 20 LS dengan ketinggian sekitar 780-950 meter di atas permukaan laut. Luas Kota Bukittinggi sendiri berkisar 25.239 km², merupakan 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Udara sejuk dan suhu yang berkisar 16,10° C-24,9° C, sedangkan untuk kelembapan udara sendiri berkisar antara 82°-90,8°.

Batas-batas wilayah Kota Bukittinggi yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Nagari Gadut, Kapau, Kecamatan Tilatang kamang, Agam.
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Agam.
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang, Kecamatan IV Koto.
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Tanjung Alam, Ampang Gadang, IV Angkek, Agam.

Kota Bukittinggi terletak hampir di tengah-tengah Pulau Sumatera, di atas jajaran bukit barisan dengan lapisan tuff dari lereng gunung merapi sehingga tanahnya subur, namun luas wilayah yang digunakan untuk

pertanian sangat sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel dan pasar.

Data secara lengkap mengenai keadaan geografis Kota Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Keadaan Geografis Kota Bukittinggi

No	Letak Geografis, Iklim dan Topografi	Keterangan
	a. Letak Geografis	Bukittinggi terletak antara 100° 20-100° 25 BT dan 00° 16 -00° 20 LS
	b. Ketinggian dari permukaan laut	Sekitar 780-950 meter
	c. Batas daerah	
	Utara	Agari Gadut, Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Agam.
	Selatan	Talauak IV suku, Kecamatan Banuhampu, Agam.
	Barat	Agari Sianok, Guguk dan Koto gadang, Kecamatan IV Koto
	Timur	Injung Alam, Ampang Gadang, IV Angkek, Agam.
	Iklim	
	a. Temperatur udara	Berkisar max 24,9° C Min 16,10° C
	b. Kelembapan udara	Berkisar max 90,8° Min 82°
	Topografi	Permukaan bumi tidak merata, bergelombang dan berbukit. Di Kota Bukittinggi terdapat sungai kecil yaitu Batang Tambuo di sebelah Timur, batang sianok di sebelah Barat. Tanah merupakan lapisan tuff dari lereng gunung merapi, karena itu tanahnya subur.

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

Kota Bukittinggi saat ini terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan yang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan

Memiliki luas wilayah 12.156 km² yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu Kelurahan Cimpago Ipuh, Kelurahan Cimpago Guguk Bulek, Kelurahan Gulai Bancah, Kelurahan Puhun Tembok, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Manggis, Kelurahan Pulai Anak Air, Kelurahan Garegeh dan Koto Salayan.

2. Kecamatan Guguak Panjang

Memiliki luas 6.831 km² yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Bukik Apik Puhun.

3. Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh

Memiliki luas 6.252 km² yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu Kelurahan Blakang Balok, Kelurahan Birugo, Kelurahan Aur Kuning, Kelurahan Sapiran, Kelurahan Kubu Tanjung, Kelurahan Pakan Labuah, Kelurahan Ladang Laweh, Kelurahan Parit Antang.

Data secara lengkap mengenai luas kecamatan yang ada di Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Luas Daerah Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas kecamatan
1.	Guguak Panjang	6.831 km ²
2.	Mandiingin Koto Salayan	12.156 km ²
3.	Aua Birugo Tigo Baleh	6.252 km ²

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Guguk Panjang karena BTC terletak di kecamatan ini yang terletak di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah, tepatnya di sekitar Jalan Perintis kemerdekaan dan Jalan Soekarno Hatta Bukittinggi.

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, kemudian disusul Kecamatan Guguk Panjang. Sedangkan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh.

B. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Pada umumnya peran besar dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat jika diimbangi dengan sumber daya alam yang memadai adalah penduduk. Jumlah penduduk suatu negara dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan cenderung bertambah yang sangat tidak diimbangi oleh penyebaran penduduk yang merata dan laju pertumbuhan yang tidak terkendali maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Dengan luas wilayah yang relatif tetap maka pertumbuhan penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan potensi wilayah tinggal penduduk. Di Kota Bukittinggi itu sendiri terjadi laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dimana tahun 2006 tingkat kepadatan penduduk masih sekitar 3.651 orang/km², sedangkan tahun 2009 tingkat kepadatan penduduk meningkat menjadi 4.271 orang/km².

Data secara lengkap mengenai kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk
1.	Guguk Panjang	5.774 orang / km ²
2.	Mandiingin Koto Selayan	3.620 orang / km ²
3.	Aua Birugo Tigo Baleh	3.896 orang / km ²

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

Berdasarkan tabel kepadatan penduduk di atas, kepadatan penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Guguk Panjang sebesar 5.774 orang/km², sedangkan kepadatan penduduk ke dua dengan jumlah 3.896 orang/km² berada pada Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh dan Mandiingin Koto Selayan memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu 3.620 orang/km².

Sedangkan indikator kependudukan Kota Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:

Tabel. 4 Indikator Kependudukan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	107.805
2.	Pertumbuhan penduduk (%)	1,78
3.	Kepadatan penduduk (jiwa/ km ²)	4.271

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

Berdasarkan hasil registrasi pada tahun 2009, jumlah penduduk Kecamatan Guguk Panjang berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 19.856 orang dan laki-laki sebanyak 19.583 orang. Kecamatan

yang memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, perempuan sebanyak 22.385 orang dan laki-laki 21.622 orang. Jumlah terkecil berada di Kecamatan Aua Birugo Tigo baleh dimana perempuan sebanyak 12.330 orang dan laki-laki 12.029 orang. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jenis kelamin	
		Laki – laki	Perempuan
1.	Guguak Panjang	19.583	19.856
2.	Mandiangin Koto Selayan	21.622	22.385
3.	Aua Birugo Tigo Baleh	12.029	12.330

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

2. Pendidikan

Bukittinggi merupakan kota pendidikan di Sumatera Barat. Ini didukung oleh fasilitas pendidikan yang dimiliki Kota Bukittinggi yaitu: 62 Sekolah Dasar (SD), 12 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 28 Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 5 Madrasah Aliyah (MA), dan 17 Perguruan Tinggi (PT).

Jumlah mahasiswa perguruan tinggi/akademi ataupun swasta pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 10.020 orang dari 9.163 orang tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 20,77%.

Dari hasil pendataan Susenas 2009, tercatat ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk Kota Bukittinggi dengan persentase terbanyak ada pada kelompok SMTA/ sederajat yaitu sebesar 35,51% pada kelompok ini ijazah tertinggi dimiliki penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 35,60% berbanding 35,38%.

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu wilayah salah satunya dapat ditunjukkan oleh kemampuan membaca dan menulis dari penduduknya. Angka melek huruf dapat dijadikan indikator tingkat pendidikan penduduk suatu daerah karena dengan kemampuan tersebut seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan.

Tabel. 6 Indikator Pendidikan

No.	Uraian	Tahun 2009		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Angka melek huruf	99,43	99,02	99,21
2.	Rata-rata lama sekolah			10,41
3.	Angka partisipasi sekolah			
4.	Tidak/ belum pernah sekolah	2,67	2,97	2,92
5.	Masih bersekolah	29,24	30,50	29,81
6.	Tidak bersekolah lagi	67,89	66,53	

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2010

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan manifestasi hubungan manusia dengan segala potensinya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Mata pencaharian masyarakat Kota Bukittinggi lebih dominan dibidang perdagangan, industri, pegawai negeri dan lainnya.

Pada umumnya mata pencaharian lebih pada sektor perdagangan, karena Kota Bukittinggi memiliki potensi pasar yang sangat memadai dan sarana prasarana yang mendukung. Apalagi didukung dengan fungsi Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dengan didukung oleh 3 pasar induk yaitu Pasar Atas, Pasar Aur dan Pasar Bawah. Ke 3 pasar inilah yang menjadikan Kota Bukittinggi sebagai pusat sentral perdagangan bukan hanya berskala regional tapi mencakup skala nasional.

4. Agama

Penduduk di Kota Bukitinggi memiliki beragam agama, karena penduduknya sendiri bukan berasal dari penduduk asli tetapi ada juga penduduk pendatang. Mayoritas penduduk asli, minoritas penduduk pendatang seperti keturunan china sehingga agama yang ada pun beragam.

Data secara lengkap jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel 7 berikut:

Tabel. 7 Jumlah Penduduk Berdasar Agama

No	Agama	Jumlah berdasarkan kecamatan			Jumlah
		Guguk Panjang	Mandiingin Koto Salayan	Aua Birugo Tigo Baleh	
1.	Islam	38.410	43.487	23.930	105.827
2.	Kristen Khatolik	427	168	159	754
3.	Kristen Prosestan	360	313	261	934
4.	Hindu	10	28	0	38
5.	Budha	232	11	9	256

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan agama mayoritas penduduk Bukittinggi beragama Islam yakni dengan jumlah 105.827, kemudian diikuti dengan penduduk beragama Kristen Prosestan dengan jumlah 934, penduduk beragama Kristen Khatolik berjumlah 754, jumlah penduduk sebanyak 256 yakni beragama Budha dan jumlah terkecil adalah penduduk beragama Hindu sebanyak 38.

5. Kehidupan Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Bukittinggi tidak terlepas dari perbauran berbagai etnis dan budaya sehingga mereka dituntut untuk dapat menerima perbedaan tersebut. Hal ini didorong oleh beragamnya etnis yang ada dan ramainya pengunjung ke kota ini dalam setiap harinya dari berbagai kota, berbagai provinsi dan berbagai negara.

Dalam hal aturan hidup sehari-hari, masyarakat Bukittinggi tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang didominasi daerah ini yaitu

Etnis Minangkabau. Masyarakat Minangkabau diatur berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*). Walaupun demikian dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap menghormati penghulu dan datuk sebagai pimpinan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam aturan sosial kemasyarakatan Minangkabau, orang tidak boleh kawin dalam satu suku, mereka harus mencari jodoh dari suku lain.

Kerapatan (musyawarah) penghulu merupakan kekuasaan yang tertinggi di nagari yang biasa disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan suatu unit dalam sistem pemerintahan tradisional Minangkabau. Etnis Minangkabau di Bukittinggi diatur dalam sebuah kesatuan adat yang dinamakan Nagari Kurai Limo Jorong (Zul Asri, 2001-41).

Berbagai keperluan kemenakan yang berkaitan dengan masyarakat luas diatur dan di musyawarahkan dengan ninik mamak, datuk dan penghulu. Hal ini karena adanya kekuatan adat yang dimiliki orang-orang tersebut seperti: acara baralek, batagak panghulu, menaiki rumah dan sampai acara kematian.

C. Keadaan Pasar Kota Bukittinggi

Salah satu potensi unggulan di Kota Bukittinggi adalah dibidang perdagangan, dimana disesuaikan dengan sejarah dan fungsi Kota Bukittinggi itu sendiri yaitu sebagai salah satu pusat kota perdagangan di Provinsi Sumatera Barat yang dimaksudkan sebagai tempat transaksi jual beli

bagi masyarakat. Lokasi ini berkembang dan diperluas menjadi pusat perdagangan masyarakat Bukittinggi hingga sekarang.

Fungsi Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan semakin melekat pada Kota Bukittinggi dengan didukung oleh 3 pasar induk yaitu Pasar Atas, Pasar Aur dan Pasar Bawah. Ke 3 pasar tersebut menjadikan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan bukan hanya berskala regional tapi mencakup skala nasional bahkan mancanegara.

Di antara ke 3 pasar tersebut, Pasar Bawah merupakan salah satunya pasar tradisional yang ada di Kota Bukittinggi dimana di Pasar Bawah inilah segala bentuk kebutuhan pokok harian masyarakat tersedia dengan lengkap. Pasar Bawah sebagai pusat pasar tradisional terletak di kawasan strategis karena terletak di jalur transportasi Bukittinggi yang selalu ramai dilewati. Di Pasar Bawah atas 2 bagian yaitu Pasar Aua Tajungkang dan Pasar Banto (BTC).

Sebagai pusat perdagangan Kota Bukittinggi, pasar di Bukittinggi memiliki jumlah toko sebanyak 3.051 toko dan los 8.115 m² dimana dapat menampung 5.154 penjual. Data secara lengkap mengenai luas toko dan los pasar Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel 8 berikut:

Tabel. 8 Luas Toko Dan Los Pasar Bukittinggi Beserta Jumlahnya

No.	Pasar	Toko		Los		Jumlah
		Luas	Jumlah Toko	Luas	Jumlah Los	
1.	Pasar Atas	9.104	947	854	287	1.234
2.	Pasar Bawah	5.113	624	2.989	646	1.270
3.	Pasar Aur	13.632	1.484	4.272	4.221	5.075

Sumber: BPS Bukittinggi Tahun 2010

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa Pasar Aur yang memiliki jumlah toko dan los yang banyak yaitu berjumlah 5.075, kemudian diikuti oleh Pasar Bawah dengan jumlah total 1.270. Jumlah terkecil yaitu 1.234 berada pada Pasar Atas Bukittinggi.

D. Keadaan Pasar Banto Bukittinggi

Pasar Banto merupakan salah satu pertokoan yang berada pada salah satu titik dari 16 titik kawasan perdagangan yang ada di Kota Bukittinggi. Pertokoan ini luasnya 7.484 m² dan 285 petak toko dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Pemuda dan Janjang 40

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Pemuda, Jalan Veteran dan Jalan
Bahder Johan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Soekarno Hatta

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Perintis Kemerdekaan

Dalam perkembangannya semenjak tahun 70 an dari perubahan fungsi menjadi lokasi perdagangan yang sebelumnya terminal, lokasi ini sama sekali tidak menunjukkan peningkatan meskipun disekitarnya terdapat lokasi pemberhentian Angkot atau Apedes seperti: daerah Gadut, Pakan Kamih, Palupuah, Kubang Putih, Magek, Surau Gadang, Kapau dan Tanjung Alam yang seharusnya itu semua dapat menarik minat pembeli maupun pedagang untuk melakukan transaksi jual beli karena lokasi mereka berjualan sangat dekat dengan arus transportasi sehingga tidak susah untuk mengangkut

barang bawaan, tapi dari 285 petak toko hanya 160 petak toko yang dimanfaatkan.

Lokasi Pasar Banto dimanfaatkan oleh pedagang yang terdiri dari 4 bagian yaitu: pedagang atas bandar, pedagang perabot, pedagang basi tua dan pedagang bangunan induk. Dimana bangunan induk ini hanya terdapat pada bagian luar dan dilantai bawah saja, namun hanya pedagang perabot dan besi tua saja yang mendominasi di Pasar Banto. Selain itu pedagang lain juga terdapat di Pasar Banto seperti: usaha taylor, pangkas rambut, toko kue, makanan ayam, jual unggas, toko obat, toko buku, alat-alat listrik, alat-alat mobil bekas, makanan dan minuman. Dibagian bawah terdapat 3 agen perjalanan dan dibagian pertokoan ini terdapat sarana permainan dingdong yang selalu ramai dikunjungi remaja dan anak-anak.

Lokasi Pasar Banto ini terdapat area perjudian, prostitusi dan tempat mabuk-mabukan meskipun sembunyi-sembunyi tetapi sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Sarana yang terdapat di Pasar Banto seperti: 2 WC Umum, prasarana seperti: fasilitas listrik dan telepon.

Pedagang di pertokoan ini mulai berjualan pukul 9 atau 10 pagi dimana pedagang dan karyawan mulai menata barang dagangan mereka seperti: membersihkan, membereskan barang dagangannya. Saat siang hari pada dimana karyawan kantor maupun anak sekolah sudah pulang lokasi pertokoan ini sangat ramai karena banyak orang yang menunggu angkot, selain itu banyaknya masyarakat yang lalu lalang menyebabkan kemacetan di sekitar pertokoan tersebut seperti angkot menuju pusat kota seperti Ikabe No

03, 19, 14, 15 lalu ada pula yang menuju Terminal Aur Kuning dimana tempat naik dan pemberhentiannya disekitar area Pasar Banto tersebut. Disamping itu, ada tempat pemberhentian bendi-bendi di luar pertokoan Pasar Banto yang berhadapan dengan pasar sayuran yang ada di Pasar Bawah tepatnya di sebelah Timur pertokoan yang menambah kesemrawutan di sekitar Pasar Banto. Dimana pada malam hari, lokasi parkir Pasar Banto dimanfaatkan oleh PKL untuk menjual makanan.

Melihat situasi ini, Pemerintah Kota Bukittinggi bekerjasama dengan investor ingin menjadikan Pasar Banto menjadi pertokoan yang *resepresentatif* karena terletak di lokasi strategis sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Selain itu, untuk menghindari lokasi Pasar Banto ini menjadi tempat perbuatan maksiat pada malam harinya.

E. Sejarah Singkat Pembangunan Pusat Pertokoan BTC Bukittinggi

Pasar Banto lebih kurang 25 tahun yang lalu adalah salah satu pasar yang bangunannya sangat megah akan tetapi ditempati oleh pedagang yang managementnya sangat lemah dan tradisional sehingga keberadaan Pasar Banto tidak dapat mendorong pertumbuhan pasar dalam mendukung fungsi kota Bukittinggi.

Proses perencanaan pembangunan pusat pertokoan di BTC dimaksudkan agar merubah pertokoan yang tidak *resepresentatif* menjadi *resepresentatif* dan dapat berfungsi secara maksimal serta mengatasi permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi di kawasan Pasar Banto.

Namun dalam hal ini Bukittinggi tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pusat pertokoan BTC ini. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mencari dana untuk membangun BTC melalui investor.

Proses perencanaan pembangunan pusat pertokoan BTC Bukittinggi diawali dengan penetapan konsultan perencanaan yang sejak awal telah melalui tahapan yang sangat transparan (dimana telah melalui persetujuan DPRD sebelum melakukan kerjasama), hal ini diawali gagasan PT Geotek Nusantara untuk memberikan alternatif solusi masalah perencanaan dan tidak optimalnya pemanfaatan Pasar Banto sebagai pusat perdagangan. Hasil kajian PT Geotek Nusantara dipresentasikan dihadapan jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 25 September 2002 di Balaikota.

Setelah ditetapkan konsultan perencanaan, maka untuk pemilihan investor tidak melalui tender, maka tender tersebut dimenangkan oleh PT Petco. Kemudian pada tahun 2004 Pemerintah Kota Bukittinggi membuat surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT. Petco Energy Indonesia tentang pembangunan dan pengelolaan Pasar Banto bernomor 06/SP/HK-2004-241/PEI-SK/VIII/2004.

Namun oleh PT Petco dalam pengelolaan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian dimana terdapat permasalahan intern PT Petco sendiri sebagaimana yang terdapat dari data LSM Allansi Rakyat Anti Korupsi bahwa adanya masalah pada PT Petco yaitu, PT Petco selaku investor tidak mempunyai

dana yang cukup dan terbukti dengan melampirkan daftar pengalaman kerja kurang baik dan diduga palsu.

Dengan adanya masalah tersebut, maka PT Petco tidak melanjutkan pekerjaannya dalam pembangunan pusat pertokoan BTC ini. Sehingga pada tahun 2006 ada investor yang berminat untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan ini yaitu PT Citicon, maka dilanjutkan oleh PT Citicon. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan investor kedua ini yakni PT Citicon dikeluarkan melalui SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-06-2006 tentang kerjasama serta penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pusat pertokoan dan gedung parkir BTC Bukittinggi dengan PT Citicon-Jakarta.

F. PKL Di Kawasan BTC Bukittinggi

BTC pada dasarnya diperuntukkan bagi para pedagang agar bisa berdagang di tempat yang lebih layak dan lebih baik yang telah disediakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Namun operasional BTC pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Sejak diresmikannya BTC kondisi BTC sangat sepi dari penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan penjual mengalami kesulitan untuk mengontrak maupun membeli kios toko yang telah disediakan. Kondisi ini yang dimanfaatkan para PKL untuk berdagang di kawasan BTC khususnya areal trotoar, areal parkir BTC, bahkan sampai memakai badan jalan.

PKL yang berada di kawasan BTC adalah para pedagang pendatang yang datang dari luar Kota Bukittinggi seperti Agam maupun dari Kota Payakumbuh. Biasanya barang dagangan mereka merupakan hasil panen dari daerah mereka masing-masing yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan ataupun lauk pauk.

Ketidakoptimalan BTC inilah yang dimanfaatkan oleh para PKL untuk dapat berdagang di kawasan BTC. Maraknya pertumbuhan PKL di kawasan BTC pada umumnya berada di areal trotoar sepanjang BTC, areal parkir BTC dan sampai memakai badan jalan di kawasan BTC. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasubag Perencanaan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi, Asra Gemet Amir (50 tahun):

“PKL di kawasan BTC pada umumnya berada di tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum seperti disepanjang trotoar, dan pertumbuhan PKL yang tidak terkendali dapat memaksa mereka memakai badan jalan untuk berdagang” (wawancara, 16 Maret 2011).

Hal senada juga diucapkan oleh Bapak Rekha Syahrul, Kabag Operasional Dinas Satpol PP berikut:

“PKL boleh saja berdagang di tempat yang dianggap strategis tetapi tidak melanggar aturan yang ada. PKL di kawasan BTC itu sendiri menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, padahal PKL tahu bahwa tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk berdagang” (wawancara, 21 Maret 2011).

Dengan membiarkan para PKL tetap berdagang di areal fasilitas umum maka hal ini mampu mengganggu kepentingan orang banyak. Perkembangan PKL di kawasan BTC ini sendiri pada kenyataannya didorong oleh beberapa alasan antara lain karena kawasan yang dinilai strategis untuk berdagang dan

didorong juga karena faktor ekonomis. Kawasa BTC terletak di kawasan yang selalu ramai dari kehidupan masyarakat umum karena terletak di kawasan yang strategis dimana selalu dilewati transportasi Kota Bukittinggi, lokasi BTC juga berdekatan dengan lokasi Pasar Bawah yang merupakan pasar tradisional yang ada di Bukittinggi sehingga kawasan BTC selalu ramai dilewati oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota Satpol PP, Tresno Waldi (30 tahun):

“Pemicu utama perkembangan PKL di kawasan BTC adalah alasan kondisi tempat yang strategis karena terletak di kawasan keramaian dari masyarakat maupun arus lalu lintas. Dapat dilihat bahwa jalur arus utama transportasi Kota Bukittinggi akan melewati kawasan BTC ini” (wawancara, 23 Maret 2011).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh PKL sendiri yaitu Ibu Em (37 tahun):

“Manggaleh di siko ko sanang, di siko rami taruih jo urang nan lalu jo urang nan ka mambali pulo dek dakek ka jalan ko mah jadi galeh nan ibuk baok capek lo abihnyo” (wawancara, 26 Maret 2011).

Artinya:

“Berjualan di sini senang, di sini selalu ramai dengan orang yang akan membeli dan juga dekat dengan jalan sehingga dagangan yang ibuk bawa cepat habisnya”.

Hal senada juga diungkapkan PKL lain yaitu Pak Eri (41 tahun):

“Pasa banto ko rami di urang yang ka mambali, jadi pambali nan tibo pakai angkot bisa turun langsung di siko dan mambali galeh kami ko” (wawancara, 28 Maret 2011).

Artinya:

“Pasar banto selalu ramai dengan para pembeli, jadi pembeli yang datang pakai angkot bisa turun langsung dan membeli dagangan kami”.

Selain itu, faktor ekonomis sangat mempengaruhi para PKL untuk dapat berdagang di kawasan BTC. Berdagang di kawasan BTC yang terletak di lokasi strategis, pendapatan ekonomi para PKL lebih meningkat dibandingkan mereka berdagang di tempat lain. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, biasanya pembeli lebih banyak berbelanja di kawasan BTC karena pembeli beranggapan lebih dekat untuk berbelanja dan pedagangpun lebih memiliki pendapatan yang lebih meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syafrizal (48 tahun), selaku Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi:

“Perkembangan PKL di kawasan BTC dipicu oleh faktor pendorong bahwa mereka beranggapan berjualan di BTC akan lebih meningkatkan pendapatan ekonomi mereka” (wawancara, 17 Maret 2011).

Perkembangan PKL di kawasan BTC dapat dilihat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang dan sangat sulit untuk dikendalikan, dari data yang diperoleh dari Kantor Satpol PP bahwasanya peningkatan PKL di kawasan BTC mencapai 70 orang lebih pertahunnya. Keberadaan para PKL di kawasan BTC pada saat sekarang ini sangat pesat dan semakin menjamur. Namun terkadang perkembangan mereka relatif stabil tergantung dari keadaan PKL itu sendiri, karena pada umumnya para PKL di kawasan BTC merupakan pedagang musiman. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan Kasi Perencanaan dan Keciaptakarya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Bapak Wirdjon (50 tahun):

“Secara umum perkembangan PKL di kawasan BTC dapat dikatakan dalam keadaan stabil karena pedagang di kawasan BTC merupakan pedagang musiman” (wawancara 25 Maret 2011).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi, Ade Hermon (47 tahun):

“Keberadaan para PKL di kawasan BTC dapat dilihat berkembang setiap saat dimana perkembangan PKL tidak dapat dikendalikan” (wawancara, 16 Maret 2011).

Hal senada juga diungkapkan Kasi Perencanaan Dinas Satpol PP Bukittinggi, Bapak Syafar:

“Perkembangan PKL tiap tahunnya meningkat di kawasan BTC sekitar 15-16% sehingga keberadaan PKL semakin menjamur dan sulit dikendalikan” (wawancara, 22 Maret 2011).

Perkembangan PKL di kawasan BTC secara umum sudah berkembang pesat dan keberadaan PKL sangat menjamur di kawasan BTC sampai saat sekarang ini jumlah PKL mencapai 200 orang (observasi Juli 2011). Sehingga keberadaan mereka dapat menimbulkan permasalahan di tengah-tengah kota yaitu terjadinya kesembrawutan kota sehingga keadaan kota semakin sesak dan tidak teratur dengan keberadaan mereka. Namun di sisi lain keberadaan PKL di kawasan BTC sangat membantu para pembeli agar tidak perlu ke dalam pasar untuk membeli kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang ibu rumah tangga, Yanti (44 tahun):

“Keberadaan PKL di kawasan BTC menurut ibuk sangat bagus bagi kami para ibu rumah tangga karena ibuk tidak perlu susah-susah lagi berbelanja ke dalam pasar bawah. Selain itu dagangan yang mereka bawa umumnya masih segar dan harganya lebih murah” (wawancara, 29 Maret 2011).

Hal yang sama juga diungkapkan Yelni Aswita, PNS di Bukittinggi:

“Menurut ibuk kehadiran PKL di kawasan BTC sangat membantu ibuk dalam berbelanja, turun dari angkot ibuk bisa langsung berbelanja disini tidak perlu jauh-jauh ke dalam pasar karena kualitas barang

lebih bagus, segar, dan harga lebih murah” (wawancara, 31 Maret 2011).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan PKL di kawasan BTC sangat direspon baik oleh pembeli. Para pembeli merasa terbantu dengan kehadiran PKL di kawasan BTC, selain pembeli tidak perlu jauh-jauh ke dalam pasar, kualitas barang dagangan mereka lebih bagus dari pada barang yang dijual di dalam pasar.

Kebanyakan dari PKL yang berada di kawasan BTC adalah para pedagang pendatang yang datang dari luar Kota Bukittinggi seperti daerah Agam (Gaduik, Kamang, Kapau dan Baso) maupun dari Payakumbuh. Biasanya barang dagangan mereka berupa sayur-sayuran, buah-buahan, atau pun lauk pauk. Barang dagang mereka biasanya di dapat dari hasil panen mereka dari tempat asal mereka masing-masing. Para PKL sudah mulai berdatangan pada pukul 05.30 WIB pada setiap harinya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ade Eka Putra selaku anggota Satpol PP:

“Seperti yang saya lihat di lapangan, kebanyakan para PKL yang ada di kawasan BTC merupakan pedagang pendatang dari luar Kota Bukittinggi dimana mereka perdagang dengan membawa barang dagangan hasil dari kebun atau hasil panen mereka dari kampung. Biasanya mereka menggelar barang dagangan dengan tempak seadanya seperti digelar di atas karung atau kantong plastik” (wawancara, 23 Maret 2011).

Hal lain juga diungkapkan oleh Bapak Ade Hermon, selaku sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi:

“Kalau dilihat setiap paginya, PKL yang berdatangan di kawasan BTC kebanyakan dari mereka datang dari luar Kota Bukittinggi dengan membawa hasil panen dari kampung mereka dimana mereka tidak membutuhkan modal besar dalam berdagang” (wawancara, 16 Maret 2011).

Penertiban PKL di kawasan BTC telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi beserta jajarannya yaitu Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi. Salah satu upaya dari Satpol PP dalam penertiban adalah melakukan razia dengan cara melakukan tindakan keras seperti menegur secara tegas dan dengan cara mengangkut barang dagangan mereka ke Kantor Satpol PP.

Pada kenyataannya upaya penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar membuat resah para PKL di kawasan BTC. Hal ini disebabkan karena PKL merasa penertiban hanya akan menghentikan mata pencaharian mereka.

PKL di kawasan BTC selalu saja di kambinghitamkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi atas terjadinya kemacetan dan kesemberawutan kota yang terjadi khususnya di kawasan BTC. Hal ini yang menyebabkan para PKL selalu saja ditertibkan. PKL dalam problem penertiban ini hanya meminta solusi agar mereka dapat berjualan dengan tenang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat problematika dalam penertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi, antara lain: (1) kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap PKL di kawasan BTC, (2) keterbatasan jumlah personil aparat, dalam setiap penertiban jumlah personil yang diturunkan ke lapangan adalah sebanyak 1 regu yaitu 15 orang personil namun pada kenyataannya jumlah personil yang ada tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah personil tidak lebih dari 10 orang dalam melakukan penertiban, jumlah ini masih kurang dan tidak seimbang dengan jumlah PKL yang ada di kawasan BTC. Hal inilah yang menjadi problem Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi, (3) keterbatasan lahan lokasi pasar, Kawasan areal BTC merupakan salah satu tempat yang dijadikan pedagang untuk berjualan karena tidak mendapat tempat di dalam pasar. Hal ini menyebabkan kawasan BTC semakin sesak dengan para PKL. Keterbatasan lahan lokasi di Pasar Bawah inilah yang menyebabkan meningkatnya PKL di kawasan BTC, (4) rendahnya kesadaran hukum bagi para PKL, dimana adanya faktor krusial yaitu minimnya kesadaran PKL atas penertiban yang dilakukan Pemko Bukittinggi, (5) pandangan pro dan kontra tentang keberadaan PKL di kawasan BTC, Pandangan pro dan kontra dari masyarakat tentang keberadaan PKL di kawasan BTC Bukittinggi ikut mempengaruhi keberadaan dari PKL

itu sendiri. Dimana sebagian masyarakat ada yang mendukung agar para PKL ini ditertibkan dan sebagian lagi ada yang tidak suka para PKL ini untuk ditertibkan atau diperbolehkan berjualan di tempat-tempat fasilitas umum yang ada di kawasan BTC Bukittinggi.

B. Saran

PKL pekerja di sektor informal adalah sekumpulan masyarakat yang berjuang keras untuk bertahan hidup dari hari ke hari tanpa berniat melanggar peraturan yang ada yaitu Perda Kota Bukittinggi No.25/2004 dengan tegas menyatakan larangan untuk berjualan di jalan-jalan, trotoar, tempat umum, taman, jenjang umum dan lainnya.

Upaya penertiban telah dilakukan oleh Pemko Bukittinggi dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi, aturan yang ada selama ini melarang PKL untuk berdagang di kawasan BTC Bukittinggi dan sekitarnya yang disertai dengan sanksi, namun Pemko Bukittinggi sendiri tidak memiliki upaya untuk memindahkan PKL ke lokasi yang lebih layak untuk berdagang. Penulis menyarankan bagi peneliti lebih lanjut untuk melihat bagaimana peran Pemko Bukittinggi dalam upaya penertiban PKL di kawasan BTC Bukittinggi. Penulis juga menyarankan bagi pihak terkait yaitu Pemko Bukittinggi secara khususnya mengenai tata ruang kota terhadap keberadaan pasar di Bukittinggi agar para PKL juga memiliki tempat yang layak untuk berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Zul. 2001. Perkembangan Kota Secara Fisik Dan Hubungannya dengan Kepemilikan Tanah. Jakarta. *Tesis Universitas Indonesia*. Tidak untuk dipublikasikan
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press
- Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Harian Haluan, Jumat 12 November 2010 halaman: 17. *Makin maraknya pedagang kaki lima di Banto Trade Centre*
- Holines. 2008. Respon Pedagang Terhadap Keberadaan BTC. *Skripsi*. Padang: FISIP UNAND
- Maleong, J. Lexy. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Manning, Chris & Tajjudin, Noer Effendi. 1987. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mathew, Milles dan Michael A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bandung: Bumi Aksara
- Sitorus, M.T, Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeth
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara
- Zulmarsal. 2009. Peranan Satpol PP dan SK4 Dalam Penertiban PKL di Kota Padang. *Skripsi*. Padang: FIS UNP
- (<http://id.Wikipedia.Organisasi/wiki/organisasi>) diakses tanggal 6 Januari 2011 pukul 19.58 wib
- (http://www.Sumbarprov.go.id/detail_news.php?id:1260) diakses tanggal 14 Januari 2011 pukul 20.06 wib
- (http://www.Bukittinggikota.go.id/v2/indek.php?file_id=1&class-news&act=read&news_id=627) diakses tanggal 16 Maret 2011 pukul 19.35 wib
- (<http://id.wikipedia.org/wiki/pembanguna>) diakses tanggal 22 Juli 2011 pukul 11.48 wib
- (http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=212) diakses tanggal 22 Juli 2011 pukul 11.50 wib